

Bab IV

Kesimpulan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mengacu pada teori dan konsep yang peneliti gunakan, dan memperhatikan data data – data yang sudah peneliti dapatkan di bab II dan bab III serta memanfaatkan analisis. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengajuan grasi yang dilakukan pemerintahan Australia merupakan hal yang sia - sia. Hal ini di karenakan kasus Bali Nine ini terjadi di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia yang memiliki hak untuk menentukan vonis mati kepada para anggota Bali Nine yang berkewarganegaraan Australia. Maka dari itu para tersangka ini wajib menjalankan proses hukum yang terdapat di Indonesia. Secara lebih rinciada dua hal penting yang peneliti temuka berdasarkan kasus ini dimana upaya yang dilakukan Australia tidak akan berhasil karena ketegasan Jokowi sebagai rational actor dalam keputusan akhir, kedua reaksi pemerintah Indonesia yang rata - rata mendukung keputusan beliau demi sumber daya manusia yang lebih berkualitas terwujud.

Indonesia maupun Australia memiliki kepentingan masing - masing dalam penyelesaian kasus ini. Australia ingin membebaskan warga negaranya dengan mengajukan grasi hingga bahkan memberikan ancaman, yakni Pemerintah Australia akan mengurangi anggaran dana asing hingga kecaman dan teror yang dilakukan oleh penduduk Australia di sekitar Kantor Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Australia. Sedangkan kepentingan nasional Indonesia merupakan hal yang tidak bisa ditawar dan diganggu gugat. Hal ini terlihat dengan adanya

ketegasan Presiden Jokowi terhadap penolakan grasi yang diajukan dan tetap membiarkan eksekusi mati sesuai tetap di jalankan dengan hukum domestik Indonesia.

Secara rasional Jokowi sebagai presiden Indonesia sudah tepat dalam menegaskan pemberian hukuman. Jika tidak, angka kematian dan kerugian negara akan terus meningkat setiap tahunnya. Disatu sisi kualitas sumber daya manusia di Indonesia perlu terus ditingkatkan sesuai dengan RPJMN Jokowi. Jika Jokowi memberi grasi maka beliau memberi peluang penyebaran narkoba di Indonesia semakin besar. Selain itu pula hukum dan keadulatan di Indonesia dianggap lemah di mata dunia. Pada masa pemerintahan SBY, beliau pernah memberi grasi terhadap Schapelle Corby warga negara Australia yang saat itu terkena kasus narkoba pula di Indonesia. Dari hal tersebut Australia akan beranggapan bahwa pemberian grasi di Indonesia sangat mudah. Akan tetapi kedaulatan Indonesia tidak dihargai hingga terjadinya kasus penyadapan telepon genggam milik SBY, ibu negara yaitu Ani Yudhoyono dan beberapa menteri, hal ini dilakukan oleh pihak Australia dan hal yang disesalkan pihak Indonesia sekali lagi tidak melakukan hal tegas dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan kasus – kasus yang terjadi antara Indonesia dengan Australia maka dapat disimpulkan bahwa selama kasus ini dinamika hubungan Indonesia dan Australia mengalami dinamika yang tidak tetap. Hingga eksekusi mati kasus Bali Nine menjadi penyebab melemahnya hubungan kedua negara ini. Hal ini di karenakan banyaknya penolakan pengajuan grasi dari pihak Australia. Tapi melemahnya hubungan kedua negara ini tidak berlangsung lama, dikarenakan

pasca kasus eksekusi mati ini Indonesia - Australia pada akhirnya melakukan kembali pertemuan di Nusa Dua Bali untuk memperkuat hubungan bilateral dalam bidang maritim, kontra - terorisme, pasukan penjaga perdamaian, industri pertahanan, dan keamanan cyber. Adanya pertemuan ini menggambarkan hubungan bilateral yang kembali normal setelah terjadinya kerenggangan pasca kasus eksekusi mati Bali Nine.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggara, Abidin Zainal, and Supriyadi Widodo Eddyono. 2017. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa ke Masa*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Bassiouni, M. Cherif. 1986. *International Criminal Law Vol 1: Crimes*. New York: Transnational Publisher.
- Baxter, Pamela, and Susan Jack. 2010. *Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers*.
- BPS. 2014. *Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan Tahun 2009-2013*. Jakarta: BPS.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Method 4th Edition*. Oxford: Oxford University.
- Burchill, Scott. 2005. *The National Interest in International Relation Theory*. Plagrave.
- Chauvel, Richard H. 1992. *Budaya dan Politik Australia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cryer, Robert, and et al. n.d. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*.
- Elster, Jon. 1989. *Nut and Bolts for the Social Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Graham T., Allison. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. n.d. *Studi dan Teori Hubungan Internasional, Arus Utama, Alternatif dan Reflektivis*.
- Hardjono, Ratih. 1992. *Suku Putihnya Australia: Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya*. Jakarta: Gramedia.
- Holsti, K J. 1998. *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga.
- Jackson, R., and G. Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- . 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Jones, Veda Boyd. 2000. *Thomas Jefferson: Penulis Deklarasi Kemerdekaan Fakta Mengenai File*. Incorporate.
- Krisna, Didi. 1993. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Grasindo.
- Mark R, Amstutz. 1998. *International Conflict and Cooperation: an Introduction to World*. McGraw Hill.
- Ningrum, Anif Kusuma. n.d. *Respon Australia Terhadap Indonesia Terkait Kasus Eksekusi Mati Duo Bali Nine Tahun 2005-2015*.
- Perwita, Anak Agung Bayu, and Mochamad Yanyan Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern: Edisi Keenam (terj. Alimandan, Modern Sociological Theory 6th Edition)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siboro, Julius. 2012. *Sejarah Australia: Dari Terbentuknya Commonwealth of Australia sampai dengan Terbentuknya Kerja Sama Regional dengan Negara-Negara Asia dan Pasifik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Silalahi, Amin. 2005. *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Batavia Press.
- Simorangkir, C. T., and dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Berita

- Aditya, Reza. *SBY Beri Grasi, MA Tetap Vonis Mati*. <https://nasional.tempo.co/read/724166/sby-beri-grasi-ma-tetap-vonis-mati-meirika-franola/full&view=ok>.
- Adzkia, Aghnia. 2015. *Duo Bali Nine Menanti Alasan Jokowi Tolak Grasi*. Accessed April 28, 2020. <https://www.cnindonesia.com/nasional/20150315131025-12-39232/duo-bali-nine-menanti-alasan-jokowi-tolak-grasi>.
- Ahaddini, Elysa Tri. *Pembatalan Grasi Kontroversional*. Accessed Maret 10, 2020. <http://www.inilahkoran./read/detail/1928121/.com>.
- BBC. 2013. *Indonesia Hentikan Sementara Kerjasama Australia*. November 20. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_sbyaus-traliahalt.
- Denny, Armandhanu. *Selubung Misteri Kematian Wartawan di Balibo*. <https://www.cnindonesia.com/internasional/20141022151113-106-7442/selubung-misteri-kematian-wartawan-di-balibo>.
- Hanggoro, Marcheilla Ariesta Putri. n.d. *4 Teror Pembela Bali Nine Kepada WNI di Australia*. <https://www.merdeka.com/dunia/4-teror-pembela-bali-nine-kepada-wni-di-australia.html>.
- Kandi, Rosmiyati Dewi. *Kronologi yang Menjerat Duo Bali Nine*. <https://www.cnindonesia.com/nasional/20150428185400-12-49829/kronologi-kasus-narkotik-yang-menjerat-duo-bali-nine>.
- Kompas. 2020. *Soal Eksekusi Mati, Semua Pihak Diminta Dukung Pemerintah*. Maret 10. <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/08481901/>.
- Kuwado, Fabian Januarius. *Pemusnahan Narkoba yang Sempat Dihadiri Jokowi, Hasilkan Asap Hitam*. https://nasional.kompas.com/read/2016/12/06/15030121/pemusnahan.narkoba.yang.sempat.dihadiri.jokowi.hasilkan.asap.hitam_forum_multilateral
- Liauw, Hindra. *Ini Kronologi Kasus Narkoba Kelompok Bali Nine*. <https://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba.Kelompok.Bali.Nine.?page=all>.
- Novaly, Rushans. *Mengungkap Ulang Kasus Bali Nine*. <https://www.kompasiana.com/rushanovaly/54f90ab3a3331110678b47cb/mengungkap-ulang-kasus-bali-nine>.

- Patnistik, Egidius. *Duo Bali Nine Sudah Terima Pemberitahuan Resmi Pelaksanaan Eksekusi Mati*.
<https://internasional.kompas.com/read/2015/04/26/15030621/Duo.Bali.Nine.Sudah.Terima.Pemberitahuan.Resmi.Pelaksanaan.Eksekusi.Mati>.
- Rafie, Barratut Taqiyyah. *Australia Hanya 1 dari 56 Negara yang Bantu Aceh*.
<https://nasional.kontan.co.id/news/australia-hanya-1-dari-56-negara-yang-bantu-aceh>.
- Rakyat Merdeka. 2020. "Dubes Aussie Pulang Kampung, Bantuan RI Terancam Dipangkas." Maret 10.
- Rinaldo. *Detik - detik Eksekusi Mati Duo Bali Nine*.
<https://www.liputan6.com/news/read/2222188/detik-detik-eksekusi-mati-duo-bali-nine-cs>.
- Saputra, Andi. *Eksekusi Mati Gelombang III, Bagaimana Dengan Ratu Narkoba Ola?*
<https://news.detik.com/berita/d-3260173/eksekusi-mati-gelombang-iii-bagaimana-dengan-ratu-narkoba-ola>.
- smh.com. *Weighing The Evidence, The Sydney Morning*.
<https://www.smh.com.au/world/weighing-the-evidence-20050305-gdkv39.html>.
- Tuwo, Andreas Gery. 2017. *Persembahan Terakhir Sindikat Bali Nine Untuk Presiden Jokowi*. Januari 23. Accessed April 30, 2020.
<https://www.liputan6.com/news/read/2176250/persembahan-terakhir-sindikat-bali-nine-untuk-presiden-jokowi#>.

Jurnal

- Alvian, Rizky Alif, and Ganesh Cantika Putri. 2017. "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi" Middle Power" Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo." *Jurnal Hubungan Internasional*, Vo. 6, No.2 152-154.
- Bappenas. n.d. "Evaluasi RPJMN tahun 2015-2019."
https://www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama/Evaluasi%20Paruh%20Waktu%20RPJMN%202015-2019.pdf
- n.d. "Barter Tak Seimbang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Memberi Grasi Kepada Schapelle Leigh Corby Terpidana Kasus Narkoba Membuat Kecewa Banyak Pihak."
- BBC. 2013. *Indonesia Hentikan Sementara Kerjasama Australia*. November 20.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_sbyaus-traliahalt.
- Bowen, G. A. n.d. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 27-40.
- BPHN. n.d. "Pasal Tentang Narkotika di Indonesia."
<https://www.bphn.go.id/data/documents/97uu022.pdf>.
- Clinton, W. David. 1986. "The National Interest: Normative Foundations" *The Review of Politics* Vol. 48 No. 4 495-519.
1992. "Committee for the Substance Abuse Coverage Study, and Institute of Medicine. *Treating Drug Problems: Volume 2: Commissioned Papers on*

- Historical, Institutional, and Economic Contexts of Drug Treatment." *National Academies Press*.
2015. "Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia - Australia Pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran." *Info Singkat Hubungan Internasional Vol. II No. 09/I/P3DI* 1-4.
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69.pdf.
- DPR RI. n.d. "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)." <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
2005. "Draft For the Government of Australia The Hon John Howard MP, Prime Minister, For the Government of the Republic of Indonesia HE Dr Susilo Bambang Yudhoyono, President 4 April 2005." <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-on-comprehensive-partnership-between-australia-and-the-republic-of-indonesia>.
- n.d. "Federal Register of Legislation, Australian Government." <https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A03366>.
- Glanville, Luke. 2005. "Who Are We to Think about the „National Interest“? ." *Australian Quarterly*, Vol. 77, No. 4 33-37.
- Hidriyah, Sita. 2015. "Implikasi Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Hubungan Indonesia - Australia." *Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VII, No. 04/II/P3DI/Februari 2015 A.9*.
- Huong, Yu Sin, and Hooi Ying Khoo. 2019. "Human Rights, State Sovereignty, and the Death Penalty: Indonesia's Diplomacy Approach on Bali Nine." *Journal of International Studies* 15 2-5.
- Indonesia – Australia Bahas Peningkatan Kerjasama Bilateral, <https://www.kemhan.go.id/2016/10/28/indonesia-australia-bahas-peningkatan-kerjasama-bilateral.html>.
- Jainah, Zainab Ompu. n.d. "NARCOTICS CRIME AS A PHENOMENON OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME." *Journal of Faculty of Law, Bandar Lampung University* 110-12.
- Kedutaan besar Australia Indonesia. n.d. "Retrieved desember 22, 2015, from Sistem pemerintahan Australia:." indonesia.embassy.gov.au/jakindonesian/sistem_pemerintahan.html.
- Kemenkeu. n.d. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/39TAHUN1999UU.htm>.
- Kemenkeu HAM Indonesia. n.d. "Perubahan Kedua Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." <http://ditjenpp.kemkumham.go.id/arsip/ln/1945/UUD1945PerubahanKedua.pdf>.
- Kemenlu. n.d. "Ketegangan Diplomatik Australia-RI Diprediksi Tidak Berlangsung Lama." "Profil Negara Australia," [http://kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=Bilateral Cooperation IDP=56&P=Bilateral L=id](http://kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=Bilateral%20Cooperation%20IDP=56&P=Bilateral%20L=id)
- Kemenlu RI Direktorat KIPS. n.d.

https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara.

Kesowo, Bambang. 2002. "Lembaran Negara RI Tahun 2002 nomor 108."
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17452/nprt/2/undangundang-nomor-22-tahun-2002#>.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Perth, Australia). n.d.
<https://kemlu.go.id/perth/id>.

Lisbet. 2015. "Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia - Australia Pasca Hukuman Mati Andrew C. dan Myuran S.", HI." *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*.

Mahkamah Konstitusi. 2007.

www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=279.

Marwan, and Jimmy. 2009. "Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan, Surabaya." *Realty Publisher*.

Menteri Hukum dan HAM RI, Patrialis Akbar. 2010. "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 100."
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c85eaa36031f/node/635/undangundang-nomor-5-tahun-2010#>.

Mitchell, James N. n.d. "Transnational Organised Crime in Indonesia - The Need for International Cooperation." *Brawijaya Law Journal* 176.

MM., Drs. Darwin Butar Butar. n.d. "Kepuslitdatin BNN."

Muladi. 2003. "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 100." *BPHN Departemen Hukum dan HAM RI* 101.

Oppenheim, Felix E. 1987. "National Interest, Rationality, and Morality." *Political Theory Vol. 15, No.3* 101.

P. M., Bar. 2016. "Hukuman Mati Duo Bali Nine. (A. K. Ningrum, Interviewer)." PMC Editor. n.d. "Indonesia's Jokowi to go all out to „smash“ drug dealers."

<http://asiapacificreport.nz/2016/06/30/indonesias-jokowi-to-go-all-out-to-smash-drug-dealers/>.

Pramesti, Tri Jata Ayu. n.d. "Hak Prerogatif."
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b886363d68d/hak-prerogatif/>.

R., Bandoro. 2006. "Politik Luar Negeri RI: Era Susilo Bambang Yudhoyono."
http://tamara-shidazhari-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-212362-Studi%20Strategis%20Indonesia%20II%20Politik%20Luar%20Negeri%20ORI-Politik%20Luar%20Negeri%20RI:%20Era%20Susilo%20Bambang%20Yudhoyono.html.

RI. n.d. "UU RI No. 5 Tahun 2009."
<https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/wp-content/uploads/2018/02/NOMOR-5-TAHUN-2009.pdf>.

Rochester, J. Martin. 1978. "The National Interest and Contemporary World Politics." *The Review of Politics, Vo. 26, No. 1* 5-18.

- Rudy, May T. 2002. "Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin." *Refika Aditama* 27.
- S. IP, R. Aj. Rizka F. Prabaningtyas. 2013. "Indonesia–Australia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan." *Institute Of International Studies, Commentaries, Vol. 20, Issue 1*.
- Sakti, Taruna Rastra. 2016. "Kerja Sama Keamanan: Studi Kasus Traktat Lombok Antara Indonesia Dan Australia." *Jurnal Hubungan Internasional, No. 1* 101.
- Sekretariat Kabinet RI. n.d. "Sudah Darurat, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pengampunan Untuk Kasus Narkoba." <https://setkab.go.id/sudah-darurat-presiden-jokowi-tegaskan-tidak-ada-pengampunan-untuk-kasus-narkoba/>.
- Setjen DPR RI. n.d. "Situs DPR RI." DPR" <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Sifris, Ronli. 2007. "Balancing Abolitionism And Cooperation On The World's Scale : The Case of Bali Nine." *Federal Law Review Vol 35*.
- n.d. "Surat terbuka yang dipublikasikan." *The Lancet*. (https://www.usd.ac.id/f113/berita/Lancet_Surat%20Terbuka_bahasa%20Indonesia.pdf)